



# 2022

## RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN BALANGAN



**BKPSDM KABUPATEN BALANGAN**

Jl. A. Yani Km. 4,5 Telp./Faks. (0526) 2028060

Paringin Selatan

## KATA PENGANTAR

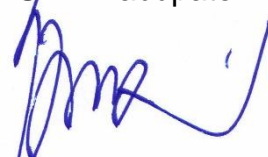
Kami mengawali penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Balangan Tahun 2022 ini dengan ungkapan syukur ke hadirat Allah SWT, dengan harapan agar kinerja BKPSDM Kabupaten Balangan dapat tercapai dengan baik sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dan program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019.

Renja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Balangan. Rencana kerja tersebut juga merupakan turunan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang dalam proses perumusan/penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2022 sebaik mungkin. Namun karena keterbatasan dalam banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi BKPSDM Kabupaten Balangan.

Paringin, Oktober 2021

Kepala BKPSDM Kabupaten Balangan,



**H. Sufriannor, S.Sos, M.AP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681012 198903 1 009

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Sistematika Penyusunan .....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ....	5
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	5
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	16
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	24
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	29
A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	29
B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	31
C. Program dan Kegiatan .....	31
BAB V PENUTUP .....	41

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

<b>No.</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Balangan	7
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan	17
2.3	Target dan Realisasi Kinerja IKU BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2020	18
2.4	Capaian Kinerja Indikator Sasaran Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan	20
2.5	Capaian Kinerja Indikator Sasaran Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	22
2.6	Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas	23
2.7	Capaian Nilai AKIP dan Perbandingan Tahun Sebelumnya	24
2.8	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Balangan	27
2.9	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Balangan	28
3.1	Peta Strategi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024	30
3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Balangan	33

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui pengkajian kondisi riil dan empiris BKPSDM Kabupaten Balangan, evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap capaian Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan.

#### **A. Latar Belakang**

Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan kegiatan tahunan ke dalam Langkah-langkah yang lebih konkret dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kualitas dokumen Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan,

mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, dan penetapan Renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020 dan reviu pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2021 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2022.

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan secara konkret dan terukur selama kurun waktu satu tahun rencana.

#### **D. Sistematika Penyusunan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan

##### **BAB IV PENUTUP**

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

BKPSDM Kabupaten Balangan pada tahun 2020 masih bernama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Balangan. Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi urusan BKPPD pada tahun tersebut secara umum dapat disimpulkan memenuhi target, kecuali 2 (dua) sub kegiatan, yaitu: 1) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN, dengan indikator kinerja terfasilitasinya kelembagaan KORPRI Kabupaten Balangan yang hanya tercapai 40,54% dari target maksimal ditetapkan 100%; dan 2) sub kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat yang ekuivalen dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, dengan indikator kinerja jumlah ASN yang dikirim/mengikuti pelatihan struktural yang hanya terealisasi sebesar 17,50%.

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja 2 (dua) sub kegiatan tersebut adalah Pandemi Covid-19 yang masih terjadi di tingkat global, nasional, regional, dan lokal serta kebijakan pengalihan sebagian anggaran Pemerintah Daerah untuk mengatasi dan menanggulangi dampak Covid-19 (*refocusing* anggaran). Pandemi tersebut berakibat kegiatan fasilitasi kelembagaan KORPRI seperti peringatan hari ulang tahun dan kompetisi olahraga dan seni dalam rangka HUT KORPRI, Apel Kesadaran Nasional, senam pagi, dan ceramah agama tidak dapat diselenggarakan. Sedangkan pelatihan struktural yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Selatan juga dibatasi pelaksanaannya oleh instansi tersebut karena masa pandemi Covid-19. Pelatihan yang memadukan konsep klasikal dan non-klasikal mulai dialihkan menjadi *blended learning*, yaitu

memakai konsep pembelajaran secara elektronik (*e-learning*) dan tatap muka menggunakan aplikasi.

Indikator kinerja selain 2 (dua) sub kegiatan dimaksud relatif memenuhi target serta tidak ada program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang melebihi target yang direncanakan. Adapun faktor penyebab keberhasilan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, antara lain, ketersediaan sumber daya yang mampu menggerakkan organisasi. Sumber daya dimaksud adalah sumber daya manusia (SDM) yang mampu bekerja sama dan bersinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, ketersediaan dana/anggaran, serta sarana dan prasarana tersedia. Dukungan dari pimpinan daerah serta komunikasi dan koordinasi yang terjalin relatif baik dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan turut pula berkontribusi positif terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja.

Keberhasilan pencapaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2020 pada akhirnya berkorelasi positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, karena tahun tersebut merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020. Adapun target kinerja yang tidak tercapai, khususnya indikator sub kegiatan terkait pelatihan struktural/pelatihan kepemimpinan, berdampak pada tidak optimalnya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2020 pada indikator persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial yang ditargetkan 57,00%. Target kinerja sasaran perangkat daerah dimaksud pada tahun 2020 hanya tercapai 47,77%. Rincian evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 serta proyeksi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 (Tabel T-C.29. PMDN No. 86 Tahun 2017)  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021  
Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan													
5	03	Kepegawaian												
5	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) BKPSDM	72 (BB)	63.18 (B)	B	BB	100	64 (B)	≥ 64 (B)	100%		
				Persentase Pencatatan Pengelolaan Aset Dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100		
5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100		
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan dengan baik	48 dokumen	24 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100	8 dokumen	8 dokumen	16.67

## Lembar 2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun dan disampaikan dengan baik	24 dokumen	20 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	16.67
5 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan dengan baik	18 dokumen	12 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	16.67
<b>5 03 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS/CPNS	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan	30 laporan	20 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	5 laporan	5 laporan	16.67

## Lembar 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
5	03	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai ketentuan yang berlaku</b>	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100%	100%	75.00%	70.00%	93.33	100%	100%	100
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	28080 eksemplar	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	4680 eksemplar	4680 eksemplar	16.67
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100%	100%	100
5	03	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU</b>	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	5 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	5 paket	5 paket	100

## Lembar 4

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>	<b>72 bulan</b>	<b>48 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>17</b>
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
5	03	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>	<b>72 bulan</b>	<b>48 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>16.67</b>
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	20 unit	100%	100%	100%	100	20 unit	20 unit	100
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	25 unit	100%	100%	100%	100	25 unit	25 unit	100
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya layak fungsi	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100

## Lembar 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
5	03	02												
			<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>Persentase tata kelola dan pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur berlaku</b>	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100		
5	03	02	2.01											
				<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK</b>	70.00%	n/a	n/a	n/a	47.00%	47.00%	67.14		
					<b>Persentase data kepegawaian yang mutakhir/terkini</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100		
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase penerbitan SK CPNS menjadi PNS tepat waktu	100%	n/a	n/a	n/a	100%	0%	0.00	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100%	100%	100%	100%	100%	80.00%	80.00	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun ASN tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Kelembagaan KORPRI Kabupaten Balangan	100%	100%	100%	40.54%	40.54	100%	54.55%	54.55

## Lembar 6

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pemutakhiran dan rekonsiliasi data pegawai yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
					Jumlah layanan kepegawaian berbasis elektronik yang terintegrasi	5 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	100	5 layanan	5 layanan	100	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi, fungsional yang terisi	100%	37.21%	40.00%	36.12%	90.31	100%	100%	100
						Persentase SK Kenaikan Pangkat yang terbit tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase layanan pengelolaan Mutasi ASN	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase terbitnya SK Kenaikan Pangkat ASN yang memenuhi persyaratan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100



## Lembar 7

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	02	2.03		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Persentase ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi teknis dan fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</b>	30.00%	n/a	n/a	n/a	n/a	12.00%	12.00%	40
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti <i>Assesment</i>	6 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	6 orang	6 orang	100
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang direkomendasikan dalam diklat/pelatihan/bimbingan diklat teknis, tugas dan fungsi	2700 orang	97 orang	n/a	n/a	n/a	200 orang	200 orang	7.41
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan dana untuk Belajar dan Ikatan Dinas sesuai kebutuhan daerah	32 orang	6 orang	8 orang	8 orang	100	3 orang	3 orang	9.38
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang dikirim dalam Pelaksanaan Diklatpim II, III dan IV	16 orang	411 orang	40 orang	7 orang	17.50	16 orang	16 orang	100
						Jumlah Calon ASN yang dikirim Pelaksanaan Diklat Prajabatan	5 orang	125 orang	4 orang	4 orang	100	5 orang	5 orang	100
5	03	02	2.03	09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah ASN mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	47 orang	97 orang	100%	100%	100	47 orang	47 orang	100
						Jumlah Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	2 kegiatan	8 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	2 kegiatan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
5	03	02	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai ASN yang disiplin	100%	100%	100%	100%	100	100%	100		
					Persentase penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100	
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah monev dan penyusunan SKP di lingkungan Pemkab Balangan	4 kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	4 kegiatan	4 kegiatan	100
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah usulan surat keputusan penganugerahan aparatur, satya lencana karya satya	200 SK	100%	100%	100%	100	200 SK	200 SK	100
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah SK Penegakan Disiplin dan Perlindungan ASN	3 SK	100%	100%	100%	100	3 SK	3 SK	100
5	04				Pendidikan dan Pelatihan									
5	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur	78.00%	47.77%	60.00%	56.50%	94.17	63.00%	63.00%	80.77

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
5	04	02	2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang lulus sertifikasi kompetensi manajerial	100%	100%	100%	100%	100	100%	100		
					Persentase CPNS yang lulus Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti Pelatihan Struktural	30 orang	411 orang	40 orang	7 orang	17.50	4 orang	4 orang	13.33
					Jumlah Calon ASN yang memenuhi syarat Prajabatan/Latsar	114 orang	125 orang	100%	100%	100	114 orang	114 orang	100	

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah yang dilakukan, beberapa kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan dan mengoptimalkan pencapaian target kinerja pada masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan SDM aparatur pada BKPSDM Kabupaten Balangan untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dan penyerapan anggaran;
3. Melakukan reviu dan rasionalisasi target kinerja organisasi di tengah kondisi pandemi Covid-19 dan kebijakan *refocusing* anggaran dalam rangka mengatasi dan menanggulangi pandemi tersebut;
4. Mengintensifkan komunikasi dan meningkatkan kerja sama di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang telah terjalin dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

## **B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Tahun 2020 merupakan periode akhir pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020. Berdasarkan Tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa IKU sasaran perangkat daerah pada tahun tersebut sebagian besar mencapai target, kecuali 1 (satu) indikator persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial. Realisasi indikator tersebut sebesar 56,50% dari target 60,00% yang ditetapkan. Rincian pencapaian kinerja pelayanan BKPPD Kabupaten Balangan dan proyeksi pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Balangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 (Tabel T-C.30. PMDN No. 86 Tahun 2017)  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Balangan

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021*)	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial	n/a	n/a	60.00%	n/a	n/a	n/a	56.50%	n/a	n/a	n/a	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah BKPPD Kab. Balangan Tahun 2016 s.d. 2020
2	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah BKPPD Kab. Balangan Tahun 2016 s.d. 2020
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja	n/a	n/a	B	n/a	n/a	n/a	B	n/a	n/a	n/a	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah BKPPD Kab. Balangan Tahun 2016 s.d. 2020
4	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah BKPPD Kab. Balangan Tahun 2016 s.d. 2020
5	Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah BKPPD Kab. Balangan Tahun 2016 s.d. 2020
6	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	n/a	n/a	n/a	45	50	60	n/a	45	50	60	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Kab. Balangan Tahun 2021 s.d. 2026
7	Indeks Sistem Merit	n/a	n/a	n/a	260	265	270	n/a	260	265	270	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Kab. Balangan Tahun 2021 s.d. 2026
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Kepegawaian	n/a	n/a	n/a	85	90	90	n/a	85	90	90	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Kab. Balangan Tahun 2021 s.d. 2026

Keterangan :

\*) Realisasi capaian kerja tahun 2021 masih bersifat proyeksi (sedang berjalan/*on going*)

Penjelasan kinerja IKU masing-masing sasaran pada Renstra Perangkat Daerah BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2020 beserta capaian kinerja sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan (*capability*) atau keahlian (*expertise*) yang lebih dari sekedar keterampilan (*skill*) belaka. Kompetensi juga merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan pemahaman/pengetahuan tindakan nyata serta proses mental yang terjadi dalam jangka waktu tertentu serta berulang-ulang. Sehingga menghasilkan kemampuan/keahlian dalam bidang tertentu. Oleh karena itu, dikatakan pula bahwa kompetensi dibentuk oleh interaksi antara faktor pengalaman dan faktor bawaan. Kompetensi digunakan pula untuk menggambarkan pengelompokan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam pekerjaan.

Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara dapat diperoleh melalui pengalaman pekerjaan, diklat, dan tugas belajar. Untuk itu, dalam pencapaian sasaran strategis ini, BKPPD menuangkan dalam IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3  
Target dan Realisasi Kinerja IKU BKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Diklat Struktural	persen	60,00	56,50	94,17%

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
A.	Kompetensi Manajerial				
	- Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklatpim) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan	orang	7	7	100
	- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	orang	10	10	100
B	Kompetensi Teknis				
	- Terlaksananya Diklat Teknis/Tugas dan Fungsi bagi PNSD	Orang	609	609	100
	- Terlaksananya Ujian Dinas/Ujian Kenaikan Jabatan dan Ujian Penyesuaian Ijazah/Kenaikan Pendidikan	Kegiatan	3	3	100
C	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas				
	- Tersalurkannya bantuan dana untuk PNS tugas belajar dan Ikatan Dinas sesuai kebutuhan daerah	orang	8	8	100

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan upaya BKPPD dalam meningkatkan kualitas SDM Aparatur. Peningkatan kualitas SDM Aparatur dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan SDM Aparatur di Kabupaten Balangan melalui Pendidikan dan Pelatihan, baik Diklat Struktural, Diklat Formal, Diklat Teknis dan Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh BKPPD maupun oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara dicapai melalui program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara, dengan indikator persentasi peningkatan sumber daya aparatur yang mengikuti diklat struktural yang target sebesar 60 %. Indikator tersebut didukung oleh kegiatan pendidikan dan pelatihan structural bagi ASN, dengan indikator jumlah pejabat struktural yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan yang ditargetkan sebanyak jumlah kumulatif sebanyak 433 orang, dari 600 orang pejabat struktural yang terisi.

Tabel 2.4  
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian	Realisasi Tahun 2019
1.	Persentasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Diklat Struktural	60,00%	56,50%	94,17%	47,77%

Adapun pelaksanaan kediklatan yang dilaksanakan oleh BKPPD dan oleh perangkat daerah lainnya pada tahun 2020, diantaranya, kegiatan Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis Tugas, dan Fungsi, Diklat Formal dan Diklat Teknis lainnya.



- Indikator Kinerja Utama : Persentase jumlah sumberdaya aparatur yang mengikuti Diklat Struktural
  - Formulasi Perhitungan : Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat kompetensi manajerial (Diklatpim Tk.II, Tk. III, Tk IV) dibagi dengan jumlah jabatan struktural yang terisi x 100%
  - Alasan Pemilihan Indikator : Sesuai dengan amanat PP No. 11 Tahun 2011 tentang Manajemen PNS, bahwa setiap aparatur harus memenuhi persyaratan kompetensi baik kompetensi manajerial maupun kompetensi teknis dan fungsi.
2. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu
- Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan BKPPD. BKPPD melayani administrasi kepegawaian bagi para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan sejumlah 2.949 Pegawai (data per Desember 2020), diantaranya dalam pelayanan kenaikan pangkat, pensiun dengan mudah cepat dan tepat.
- Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dicapai melalui program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan indikator persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu yang ditargetkan 100% sesuai SOP, program ini didukung oleh kegiatan penataan sistem administrasi kenaikan pangkat dengan indikator persentasi terlaksananya administrasi kenaikan pangkat tepat waktu yang ditargetkan 100% sesuai SOP dan kegiatan penghargaan dan kesejahteraan aparatur dengan indikator persentasi pemensiunan pegawai yang akurat dan tepat waktu yang ditargetkan 100% sesuai SOP serta kegiatan pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah dengan indikator jumlah aplikasi layanan kepegawaian berbasis elektronik yang terintegrasi yang ditargetkan 5 (lima) layanan berbasis elektronik.

Dalam tabel berikut dapat digambarkan realisasi atau capaian yang dilaksanakan pada tahun 2020:

Tabel 2.5  
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	persen	100 (Nilai IKM 78)	107 (Nilai IKM 83,71)	107
	- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	persen	100	100	100
	- Persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu	persen	100	100	100
	- Persentase pensiun pegawai tepat waktu	persen	100	100	100

3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja.

Sasaran ini bukan merupakan IKU BKPPD Kabupaten Balangan, karena tidak berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BKPPD. Akan tetapi, sasaran ini ikut menunjang kinerja BKPPD Kabupaten Balangan dalam pelaksanaan tugas. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.6  
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Nilai Capaian Kinerja
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	nilai	B	B	100
2.	% temuan /BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100
3.	Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	persen	100	100	100

- Nilai Akuntabilitas Kinerja

Sesuai Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BKPPD sebagai instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi. Hasil evaluasi AKIP tahun 2019 yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, BKPPD Kabupaten Balangan memperoleh nilai sebesar 63,18 (enam puluh tiga koma delapan belas) kategori B dengan interpretasi Baik perlu adanya perbaikan. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang memperoleh nilai 61,26 atau predikat "B", nilai Evaluasi AKIP pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 1,92.

Tabel 2.7  
Capaian Nilai AKIP dan Perbandingan Tahun Sebelumnya

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai Tahun 2018	Nilai Tahun 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	19,74	22,68
b.	Pengukuran Kinerja	25	14,69	16,56
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,79	8,86
d.	Evaluasi Internal	10	0,64	0,00
e.	Capaian Kinerja	20	15,40	15,08
Nilai Hasil Evaluasi		100	61,26	63,18
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

- Persentasi temuan /BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti  
Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, akan selalu dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah, untuk itu bagi OPD/unit kerja yang masih memiliki tunggakan penyelesaian tindaklanjut LHP BPK agar selalu berkomunikasi dengan Inspektorat. Target kinerja berkenaan dengan indikator ini adalah seluruh temuan BPK/Inspektorat ditindaklanjuti. Untuk BKPPD hal ini sudah dilaksanakan seluruhnya (100 %)
- Persentase tertib administrasi barang/aset daerah  
Aset pada BKPPD dikelola melalui instrument yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya.

### **C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu paling penting dan mencuat di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pada Pemerintah Kabupaten Balangan adalah masih rendahnya profesionalitas ASN, khususnya pada dimensi kompetensi

aparatur. Salah satu tolok ukur yang dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas SDM Aparatur adalah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN). Indeks tersebut menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, komposisi persentase tiap dimensi dalam pengukuran IP-ASN adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi pendidikan (25%)
2. Kompetensi (40%)
3. Kinerja (30%)
4. Kedisiplinan (5%)

Jadi, kompetensi aparatur merupakan dimensi dengan persentase terbesar dalam pengukuran IP-ASN. Komposisi 40% dari dimensi kompetensi tersebut diuraikan lagi ke dalam subdimensi yang meliputi: Pelatihan Struktural atau Pelatihan Fungsional (15%), Pelatihan Teknis 20 JP (15%), dan Workshop, Seminar, dan sejenisnya (10%). Sehingga sudah seharusnya pemerintah daerah memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pengembangan kompetensi SDM aparatur, jika memiliki komitmen terhadap peningkatan kualitas ASN yang tercermin melalui profesionalitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun rentang (*range*) nilai dalam pengkategorian IP-ASN terbagi dalam sangat tinggi (91-100), tinggi (81-90), sedang (71-80), rendah (61-70), dan sangat rendah (di bawah 60). Berdasarkan hasil pengukuran, IP-ASN Kabupaten Balangan pada tahun 2019 adalah 62,35% dan mengalami peningkatan menjadi 67,06% pada tahun 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IP-ASN Kabupaten Balangan masih termasuk dalam kategori rendah.

Dimensi kompetensi menjadi salah satu kontributor yang menyebabkan rendahnya IP-ASN Kabupaten Balangan. Dimensi tersebut memiliki capaian 19,75% pada tahun 2019 atau termasuk kategori sangat rendah. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan cukup

signifikan menjadi 24,05%, walaupun masih termasuk dalam kategori rendah. Hal tersebut juga menjadi pertanda adanya masalah dalam pengembangan kompetensi SDM aparatur yang ditempuh pemerintah daerah selama ini.

#### **D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Balangan bersinggungan dengan Misi Keempat dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, yaitu meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, dengan sasaran meningkatnya kualitas reformasi birokrasi. Jadi, tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Balangan tidak berkaitan secara langsung dengan indikator tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan kata lain, Indikator tujuan dan sasaran BKPSDM hanya bersifat menunjang dan mendukung serta berkontribusi secara tidak langsung terhadap pencapaian Misi Keempat serta Tujuan dan Sasaran RPJMD pada aspek Reformasi Birokrasi.

Sehingga dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2022 tidak melakukan rewiu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022.

**Tabel 2.8 (Tabel T-C.31. PMDN No. 86 Tahun 2017)  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022  
Kabupaten Balangan**

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Lembar 1 dari 1

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

#### **E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Tujuan dan sasaran serta tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Balangan tidak berkaitan/bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kelompok yang menjadi sasaran tugas dan fungsi BKPSDM adalah SDM aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Program dan kegiatan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan secara prinsip sudah diatur dalam berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga dalam proses penyusunan rencana pembangunan, BKPSDM tidak menghimpun usulan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) atau forum sejenis.

Tabel 2.9 (Tabel T-C.32. PMDN No. 86 Tahun 2017)  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

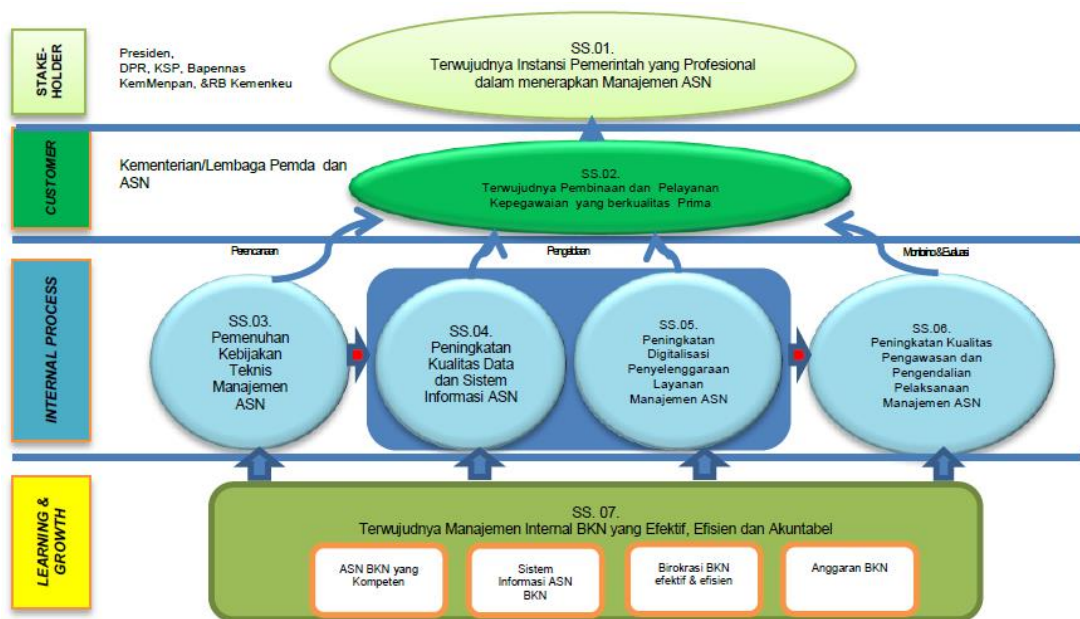
##### **A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan kepegawaian di tingkat nasional dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kebijakan kepegawaian dalam Renstra BKN Tahun 2020-2024 dijabarkan dalam 5 (lima) tujuan yaitu:

1. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Berkualitas;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima;
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN);
4. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN; dan
5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel.

Sasaran strategis yang ingin dicapai BKN adalah:

1. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN;
2. Manajemen ASN berkualitas prima;
3. Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN;
4. Terwujudnya peningkatan kualitas Data dan Sistem Informasi ASN;
5. Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan Manajemen ASN;
6. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Manajemen ASN; dan
7. Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.



Gambar 3.1  
Peta Strategi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi mitra kerja BKPSDM Kabupaten Balangan yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Sasaran strategis BKD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Peningkatan Penerapan Kinerja Individu, dengan indikator Persentase Individu Pegawai dengan Kinerja kategori Baik;
2. Peningkatan penerapan manajemen karir pegawai, dengan indikator Persentase SKPD yang mengidentifikasi kompetensi pegawai; dan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan bidang kepegawaian, dengan indikator Indek kepuasan PNS terhadap pelayanan kepegawaian.

Sedangkan sasaran strategis BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

1. Meningkatnya ASN Provinsi Kalimantan Selatan yang berkompeten, dengan indikator Persentase Peningkatan Kompetensi Alumni Diklat Teknis, Manajerial, Latihan Dasar, Fungsional dan Pemerintahan

Sesuai Tujuan Diklat dan Persentase Peserta Diklat yang Memenuhi Standar Kompetensi; dan

2. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan BPSDM, dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan BPSDM.

Berdasarkan hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan mempunyai esensi yang sama dengan tujuan dan sasaran strategis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi. Letak kesamaan dimaksud adalah manajemen ASN, pengembangan SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan kualitas layanan publik. Adapun faktor yang harus diantisipasi, yaitu kondisi Pandemi Covid-19 yang belum dapat diprediksi waktu usainya dan berpotensi menghambat koordinasi antarinstansi.

## **B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan BKPSDM Kabupaten Balangan adalah meningkatnya profesionalitas ASN, dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN). Sedangkan yang menjadi sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pengelolaan aset, dengan indikator nilai SAKIP dan persentase pencatatan pengelolaan aset dalam kondisi baik;
2. Optimalisasi tata kelola dan meningkatnya pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dengan indikator Indeks Implementasi NSPK Manajemen Kepegawaian, Indeks Sistem Merit, dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian.

## **C. Program dan Kegiatan**

BKPSDM Kabupaten Balangan pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merencanakan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 29 (dua puluh) sub kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk

melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut sebesar Rp 13.289.702.800,00 (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus rupiah). Adapun rincian rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta pendanaan tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 (Tabel T-C.33. PMDN No. 86 Tahun 2017)  
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022  
 dan Prakiraan Maju Tahun 2023  
 Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Lembar 1 dari 8

Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5					<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>				<b>13,289,702,800</b>				<b>11,109,815,700</b>
5	03				<b>Kepegawaian</b>				<b>11,205,390,900</b>				<b>8,463,157,600</b>
5	03	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) BKPSDM</b>		<b>65 (B)</b>	<b>5,829,410,800</b>			<b>67 (B)</b>	<b>5,697,135,100</b>
						<b>Persentase Pencatatan Pengelolaan Aset Dalam Kondisi Baik</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
5	03	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan dengan baik</b>		<b>100%</b>	<b>115,588,000</b>			<b>100%</b>	<b>56,963,000</b>
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan dengan baik	Kab. Balangan	8 dokumen	76,555,000	APBD	n/a	8 dokumen	16,955,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5   03   01   2.01   06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun dan disampaikan dengan baik	Kab. Balangan	4 dokumen	17,910,000	APBD	n/a	4 dokumen	18,357,000
5   03   01   2.01   07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan dengan baik	Kab. Balangan	3 dokumen	21,123,000	APBD	n/a	3 dokumen	21,651,000
<b>5   03   01   2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</b>		<b>100%</b>	<b>4,212,476,300</b>			<b>100%</b>	<b>4,557,834,700</b>
5   03   01   2.02   01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS/CPNS	Kab. Balangan	100%	4,080,032,000	APBD	n/a	100%	4,488,035,200
5   03   01   2.02   03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	Kab. Balangan	100%	114,643,500	APBD	n/a	100%	51,643,500
5   03   01   2.02   05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan	Kab. Balangan	5 laporan	17,800,800	APBD	n/a	5 laporan	18,156,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	03	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai ketentuan yang berlaku</b>		<b>100%</b>	<b>542,741,600</b>			<b>100%</b>	<b>671,478,400</b>
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	Kab. Balangan	100%	240,150,600	APBD	n/a	100%	479,288,400
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kab. Balangan	4680 eksemplar	16,023,000	APBD	n/a	4680 eksemplar	16,343,000
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	100%	286,568,000	APBD	n/a	100%	175,847,000
5	03	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>12 bulan</b>	<b>231,165,900</b>			<b>12 bulan</b>	<b>235,883,000</b>
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	100%	106,200,000	APBD	n/a	100%	107,793,000
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Balangan	12 bulan	124,965,900	APBD	n/a	12 bulan	128,090,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	03	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>12 bulan</b>	<b>727,439,000</b>			<b>12 bulan</b>	<b>174,976,000</b>
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan layak fungsi	Kab. Balangan	100%	112,765,000	APBD	n/a	100%	113,892,000
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya layak fungsi	Kab. Balangan	100%	614,674,000	APBD	n/a	100%	61,084,000
5	03	02			<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>Persentase tata kelola dan pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur berlaku</b>		<b>71.00%</b>	<b>5,375,980,100</b>				<b>2,766,022,500</b>



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK	Kab. Balangan	50.00%	3,004,178,500	APBD	n/a	55.00%	1,063,647,700
						Persentase data kepegawaian yang mutakhir/terkini		100%				100%	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Balangan	100%	2,800,001,000	APBD	n/a	100%	857,626,800
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Usulan Pensiun yang disampaikan	Dalam prov. (BKD Prov. dan BKN Regional VIII) dan Luar Prov. (Sekretariat Negara)	100%	40,099,500	APBD	n/a	100%	41,502,900
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Kelembagaan KORPRI Kabupaten Balangan	Kab. Balangan	100%	22,000,000	APBD	n/a	100%	22,440,000
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentasi pemutakhiran data kepegawaian pada database BKN	Kab. Balangan	100%	142,078,000	APBD	n/a	100%	142,078,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi, fungsional yang terisi	Kab. Balangan	100%	142,957,200	APBD	n/a	100%	176,828,600
						Persentase SK Kenaikan Pangkat yang terbit tepat waktu		100%				100%	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase layanan pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Balangan	100%	69,357,200	APBD	n/a	100%	83,228,600
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase terbitnya SK Kenaikan Pangkat ASN yang memenuhi persyaratan	Kab. Balangan	100%	73,600,000	APBD	n/a	100%	93,600,000
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi teknis dan fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		15.00%	2,015,448,900			15.00%	1,271,150,700
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti <i>Assesment</i>	Dalam dan Luar Prov. Kalimantan Selatan	18 orang	105,999,500	APBD	n/a	12 orang	105,999,500
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang direkomendasikan dalam diklat/pelatihan/bimbingan diklat teknis, tugas dan fungsi	Dalam dan Luar Prov. Kalimantan Selatan	500 orang	196,232,400	APBD	n/a	500 orang	190,232,400
						Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan UKPPI	Dalam Prov. Kalimantan Selatan	70 orang				70 orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan dana untuk Belajar dan Ikatan Dinas sesuai kebutuhan daerah	Dalam dan Luar Prov. Kalimantan Selatan	5 orang	394,323,000	APBD	n/a	5 orang	394,323,000
						Persentase ASN yang melaksanakan pendidikan S2/S3 (2022 s.d. 2026)	Dalam dan Luar Prov. Kalimantan Selatan	15.00%				20.00%	
5	03	02	2.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Persentase ASN Struktural/Administrasi yang dibiayai Diklat Teknis	Dalam dan Luar Prov. Kalimantan Selatan	10.00%	198,746,000	APBD	n/a	19.00%	370,797,800
5	03	02	2.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Persentasi Jabatan Fungsional Tertentu (Non Guru dan Kesehatan) yang memiliki sertifikat kompetensi	Dalam dan Luar Prov. Kalimantan Selatan	50.00%	1,120,148,000	APBD	n/a	60.00%	209,798,000
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai ASN yang disiplin		100%	213,395,500			100%	254,395,500
						Persentase penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat		100%				100%	
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentasi SKP Aparatur yang direviu	Kab. Balangan	50.00%	89,925,000	APBD	n/a	60.00%	89,925,000
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan ( <i>reward</i> )	Kab. Balangan	6 orang	24,740,000	APBD	n/a	6 orang	35,740,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Persentase usulan Tanda Jasa bagi Pegawai yang diproses	Dalam dan Luar Prov. Kalimantan Selatan	100%	26,416,000	APBD	n/a	100%	36,416,000
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Laporan Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti	Kab. Balangan	100%	49,265,000	APBD	n/a	100%	49,265,000
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentasi Permohonan Perceraian yang ditindaklanjuti	Kab. Balangan	100%	23,049,500	APBD	n/a	100%	43,049,500
5	04				<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>				<b>2,084,311,900</b>				<b>2,646,658,100</b>
5	04	02			<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>			<b>63.00%</b>	<b>2,084,311,900</b>			<b>66.00%</b>	<b>2,646,658,100</b>
5	04	02	2.02		<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang lulus sertifikasi kompetensi manajerial</b>		<b>100%</b>	<b>2,084,311,900</b>			<b>100%</b>	<b>2,646,658,100</b>
						<b>Persentase CPNS yang lulus Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar</b>		<b>100%</b>			<b>100%</b>		
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti Pelatihan Struktural	Dalam dan Luar Prov. Kalimantan Selatan	6 orang	2,084,311,900	APBD	n/a	6 orang	2,646,658,100
						Persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar	Kota Banjarbaru (BPSDM Prov. Kalimantan Selatan)	100%				100%	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan 2021-2026 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Adapun nomenklatur program, kegiatan serta subkegiatan pada dokumen rencana kerja ini mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2022 ini sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal. Sehingga keberhasilan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 menjadi tanggung jawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan BKPSDM Kabupaten Balangan. Dengan demikian, Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan rancangan anggaran BKPSDM yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan dan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya kesepakatan dan penetapan kaidah-kaidah dalam penjabaran Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan, yaitu sebagai berikut.

1. Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan pedoman dalam penyusunan RKA SKPD Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2022 yang memuat indikator, tolok ukur kinerja, target kinerja, kode rekening, uraian belanja per rekening, rincian perhitungan serta jumlah anggaran BKPSDM Tahun 2021. RKA tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai

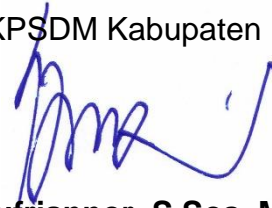
dokumen acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022.

2. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, BKPSDM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan selama tahun pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan.
3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, BKPSDM Kabupaten Balangan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2022 yang berpedoman sesuai ketentuan yang berlaku. Evaluasi dimaksud meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dengan adanya Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2022 ini diharapkan agar pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, target program, kegiatan dan sub kegiatan dapat lebih fokus, terintegrasi serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat umum serta bagi pengguna layanan BKPSDM Kabupaten Balangan. Adapun dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terlepas dari penerapan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Paringin, Oktober 2021

Kepala BKPSDM Kabupaten Balangan,



**H. Sufriannor, S.Sos, M.AP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681012 198903 1 009